

PROSPEK PENANAMAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI OLEH KELUARGA EKONOMI MENENGAH

Fitri Mutmainnah
Universitas Kahuripan Kediri
fitri@kahuripan.ac.id

Abstrak

Korupsi merupakan persoalan di era kontemporer yang menyebabkan kesengsaraan rakyat dan kehancuran negara. Korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi masih terjadi di Indonesia. Korupsinya mulai level kecil (*petty corruption*), level besar (*grand corruption*) hingga korupsi sistemik yang berlangsung di sektor pemerintah atau publik, perusahaan, maupun organisasi non-pemerintah. Keluarga dapat melakukan penanaman nilai-nilai antikorupsi dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di lingkungannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keluarga kelas ekonomi menengah menanamkan nilai-nilai antikorupsi oleh keluarga sebagai upaya pemberantasan korupsi untuk masa depan yang lebih baik. Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif menggunakan instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat pengumpul data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa setiap kepala keluarga telah melakukan penanaman tindakan – tindakan yang dapat dikategorikan Pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*), pendekatan perkembangan moral kognitif (*cognitive moral development approach*), pendekatan analisis nilai (*values analysis approach*). Saat ini memang hasilnya masih belum diketahui apakah langkah ini berhasil, akan tetapi hal terpenting adalah anak – anak dari keluarga kelas menengah sudah tertanam sikap anti-korupsi.

Kata kunci: *Penanaman nilai, anti korupsi, keluarga kelas menengah*

Abstract

Corruption is a problem in the contemporary era which cause misery and destruction of the state. Corruption as the abuse of power is still going on in Indonesia. Corruptions categories are petty corruption, grand corruption and systemic corruption that took place in the government sector or the public, corporate, and non-governmental organizations. The middle class economy families are in the strategic position in innate anti – corruption manner because this kind of family has high awareness to education. This research’s objective is to describe how the middle class families in Kediri innate the anti – corruption for their children. The objective of this research is to describe how the middle class families’ innate anti – corruption manners to their children. The research design is descriptive qualitative research and the data collections instruments are observation, interview and documentation. The research found that the middle class families have been teach their children anti – corruption manner. These manners lesson are categorized into inculcation approach, cognitive moral development approach and values analysis approach.

Keywords: *Value investment, anti-corruption, middle class family*

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan persoalan global dan nasional di era kontemporer yang dapat menimbulkan kesengsaraan rakyat dan kelumpuhan suatu negara-bangsa. Salama (2014: 152) mencatat bahwa dampak korupsi bisa berupa: 1) runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa, 2) adanya efek buruk bagi perekonomian negara, 3) korupsi memberikan kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat, 4) terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh sekelompok orang, 5) memiliki dampak sosial dengan merosotnya *human capital*.

Persoalan korupsi sudah sejak lama menjadi keprihatinan dunia internasional. Sebuah deklarasi upaya pemberantasan korupsi sudah dicetuskan dalam dokumen *United Nation Declaration Againts Corruption and Bribery In International Commercial Transaction*. Kemudian adapula *Declaration of 8th International Conference Againts Corruption* yang salah satu kesepakatannya adalah untuk memerangi korupsi diperlukan kerja sama antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Selain itu, pada tahun 2003, PBB juga menetapkan konvensi melawan korupsi melalui *United Nations Convention Againts Corruption*. Perhatian khusus dan intensif ditujukan pada permasalahan korupsi didasari oleh kenyataan bahwa korupsi telah berkembang dan menjangkit dalam komunitas internasional (Winarno, 2011: 279).

Persoalan korupsi dan upaya pemberantasannya juga sudah ada sejak lama. Itu nampak pada gagalnya upaya pemberantasan korupsi oleh berbagai lembaga pemberantas korupsi yang dibentuk di Era Pemerintahan Presiden Soekarno dan Era Pemerintahan Presiden Soeharto (Setyawati, 2008). Saat ini, serangkaian upaya

pemberantasan korupsi yang dimunculkan seolah tidak berdaya menghadapi penetrasi korupsi yang kian meluas. Korupsi kelas kecil-kecilan hingga besar-besaran masih menjadi bagian dari pengetahuan dan pengalaman sehari-hari di Indonesia. Korupsinya mulai dari level kecil (*petty corruption*), besar (*grand corruption*), hingga korupsi sistemik yang berlangsung di sektor pemerintah atau publik, perusahaan, maupun organisasi non-pemerintah. Bentuknya dapat berupa pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, penyuapan, penyogokan, tebang pilih, penyalahgunaan wewenang, kolusi, klientelisme, nepotisme, dan politik uang (Nasrum, 2013: 2).

Persoalan korupsi yang mengakar ini sepertinya sulit untuk dihilangkan karena banyaknya yang terlibat dan terjadi di berbagai kelas. Begitu kuatnya budaya korupsi sampai terkesan tidak mungkin dapat dihilangkan. Kesan yang lain adalah personel yang terlibat korupsi sepertinya tidak ada kemungkinan untuk berubah. Salah satu upaya untuk memutus budaya ini adalah dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang tidak melakukan korupsi di masa depan. Pendidikan di sekolah dan keluarga menjadi bagian penting untuk menyiapkan anak – anak yang tidak melakukan korupsi di masa depan. Keluarga dapat menjadi sebuah lembaga pendidikan yang dapat melatih anak – anak untuk menjadi pribadi yang jujur.

Pendidikan untuk mengajarkan anak –anak untuk menjadi jujur sangatlah penting akan tetapi tidak semua keluarga menyadari hal tersebut terutama keluarga kelas menengah. Keluarga tipe ini adalah keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja sehari – hari. Ini adalah fokus mereka akan tetapi disisi lain mereka mempunyai cukup waktu untuk memperhatikan pendidikan putra – putri mereka terutama pendidikan. Singkatnya, keluarga kelas menengah lebih punya kesempatan untuk mendidik putra – putrid mereka menjadi pribadi yang jujur dan jauh dari perbuatan korupsi di masa depan.

B. TINJAUAN TEORITIS

Praktik korupsi di Indonesia nampak seperti sudah membudaya dan bukan semata milik strata atas dalam jajaran pemerintahan. Korupsi sudah menjadi fenomena yang lekat mulai dari level instansi tingkat kelurahan, kabupaten/kotamadya hingga tingkat provinsi. Institusi pendidikan, kesehatan dan bahkan keagamaanpun tak luput dari tudingan melakukan praktik korupsi (Sanusi, 2009: 90). Meskipun telah ada undang-undang yang melarang berbagai bentuk/jenis perbuatan tindak pidana korupsi namun korupsi masih banyak dilakukan penyelenggara negara dan masyarakat di Indonesia.

Keluarga sering disebut sebagai bagian terkecil dari masyarakat. Secara sederhana, Murdock menjelaskan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi (Lestari, 2012: 3). Ada dua bentuk keluarga dalam berbagai kebudayaan yang ada di dunia yakni pertama, keluarga batih/ inti (*nuclear family*)

dan kedua, keluarga besar (*extended family*) (Mainarno, 2010: 3-5). Namun hasil penelitian Murdock (dalam Lestari, 2012: 3) menyebutkan satu tipe keluarga lain yakni keluarga poligami (*polygamous family*). Keluarga batih terlihat dari komposisinya yang paling dasar yakni ada ayah, ibu, dan anak yang kesemuanya sedarah (Mainarno, 2010: 3-5). Pada keluarga batih ini hanya terdapat tiga posisi sosial yakni suami-ayah, istri-ibu, dan anak-*sibling* (Lestari, 2012: 6). Sedangkan keluarga besar merujuk pada keluarga inti ditambah anggota keluarga selain anak, semisal paman, bibi, serta orang tua dari pasangan suami istri (pasutri) (Mainarno, 2010: 3-5).

Keberadaan relasi pada sebuah keluarga merupakan suatu keniscayaan. Pada umumnya, sebuah keluarga dimulai dengan adanya relasi pasangan suami-istri sebagai akibat dari suatu perkawinan. Ketika suami-istri memiliki anak maka ada relasi baru yakni relasi orang tua-anak. Kemudian, ketika anak berikutnya lahir maka lahir pula suatu bentuk relasi baru yakni relasi *sibling* (saudara sekandung) (Lestari, 2012: 9).

Relasi dalam keluarga bertalian erat dengan fungsi keluarga yang setidaknya-tidaknya ada dua yakni *pertama*, masalah seksual dan *kedua*, pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak dalam konteks sederhana berkisar pada pemeliharaan fisik. Fungsi lain yang lebih kompleks adalah membentuk karakter dan perilaku anak untuk bisa hidup di tengah-tengah masyarakat (Mainarno, 2010: 7). Oleh karena itu keluarga merupakan salah satu institusi penting dalam pembentukan karakter anak. Pembentukan karakter anak dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh pola asuh atau gaya pengasuhan yakni sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya. Penerapan pola asuh dalam keluarga akan terkait erat dengan bagaimana budaya di sekitarnya. orientasi nilai budaya akan mempengaruhi bagaimana kehidupan seseorang (Idrus, 2012: 121). dengan demikian, nilai-nilai budaya paling dominan yang dianut suatu keluarga akan sangat berpengaruh terhadap pola asuh yang diterapkan dan pada akhirnya juga akan menentukan karakter anak.

Sementara Easterly (2001) dari New York University mendefinisikan kelas menengah dengan membagi penduduk ke dalam lima kelompok pengeluaran konsumsi (*consumption expenditure*) yang sama (*quintiles*), dari kelompok masyarakat termiskin hingga terkaya. Kelas menengah menurut Easterly diperoleh dengan mengeluarkan *quintiles* terbawah (20% kelompok masyarakat termiskin) dan *quintiles* teratas (20% kelompok masyarakat terkaya). Jadi kelas menengah adalah kelompok masyarakat yang memiliki pengeluaran perkapita di *quintiles* kedua, ketiga, dan keempat. Indonesia sendiri dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan bertambahnya masyarakat kelas menengah. Banyak tanda – tanda yang menunjukkan bahwa kelas menengah mendominasi khususnya di perkotaan. Kemacetan, menjamurnya tempat nongkrong, dan larisnya makanan atau minuman kekinian menunjukkan bahwa masyarakat di daerah itu didominasi oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah. Di satu sisi ini adalah hal yang menguntungkan

akan tetapi di sisi lain, terdapat banyak masyarakat yang merasa membayar pungli adalah suatu hal kecil. Ini dapat membuat kebiasaan korupsi terutama level bawah akan semakin membudaya.

Korupsi dengan segala tingkatannya mungkin terjadi dan secara langsung maupun tidak langsung melibatkan anggota masyarakat. Pada umumnya anggota masyarakat terlibat sebagai korban misalnya terkena pungutan liar. Karena terbiasa dengan kondisi tersebut, dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan yang akhirnya menjadi budaya. Keluarga dengan status menengah adalah kelompok strategis yang dapat mengubah kebiasaan korupsi terutama korupsi level bawah. Kajian ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana keluarga dengan tingkat ekonomi menengah dapat menamamkan sikap anti – korupsi pada anggota keluarga yang lain. Harapannya adalah sikap anti korupsi ini dapat menjadi dasar untuk menumbuhkan sikap anti korupsi yang berkelanjutan.

Namun lebih dari itu, korupsi sebenarnya merupakan suatu pelanggaran atas kaidah moral. Berdasarkan model analisis korupsi “*willingness and Opportunity*”, Wijayanto (2009, 26-27) menjelaskan bahwa korupsi hanya akan terjadi bila dua hal terjadi secara bersamaan yakni adanya keinginan untuk korup dan kesempatan untuk korupsi. Faktor “keinginan untuk korup” merupakan faktor internal yang merefleksikan kualitas moral masing-masing individu. Perbaikan sistem menjadi lebih *accountable* sebagai upaya mencegah korupsi juga hanya akan berhasil bila didukung individu yang bermoral. Aspek individu pelaku korupsi memang berupa adanya sifat tamak, moral kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan kurang mencukupi untuk kebutuhan yang wajar, kebutuhan yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar (Dwiputrianti, 2009: 245).

Relasi dalam keluarga bertalian erat dengan fungsi keluarga yang setidaknya-tidaknya ada dua yakni *pertama*, masalah seksual dan *kedua*, pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak dalam konteks sederhana berkisar pada pemeliharaan fisik. Fungsi lain yang lebih kompleks adalah membentuk karakter dan perilaku anak untuk bisa hidup di tengah-tengah masyarakat (Meinarno, 2010: 7). Oleh karena itu keluarga merupakan salah satu institusi penting dalam pembentukan karakter anak. Pembentukan karakter anak dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh pola asuh atau gaya pengasuhan yakni sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya. Penerapan pola asuh dalam keluarga akan terkait erat dengan bagaimana budaya di sekitarnya. orientasi nilai budaya akan mempengaruhi bagaimana kehidupan seseorang (Idrus, 2012: 121). dengan demikian, nilai-nilai budaya paling dominan yang dianut suatu keluarga akan sangat berpengaruh terhadap pola asuh yang diterapkan dan pada akhirnya juga akan menentukan karakter anak.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik. Penelitian ini dilaksanakan di Kediri dan. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 2 bulan, yaitu pada bulan Oktober-November 2017. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu narasumber atau informan. Subjek dalam penelitian ini adalah 1. 10 Kepala Keluarga dari keluarga yang termasuk ke golongan ekonomi menengah yang tinggal di Kediri. Para kepala keluarga tersebut bekerja di beberapa bidang yang berbeda tetapi mereka semua bekerja di sektor swasta, tidak ada stupun yang berkerja sebagai PNS.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mengali informasi mengenai nilai pendidikan korupsi yang ada di pendidikan keluarganya. Dokumentasi berupa foto merupakan bukti autentik bahwa penelitian ini telah dilaksanakan. Peneliti menggunakan dokumen sebagai bagian pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, karena hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto ataupun dokumen lain. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara dengan 10 kepala keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah, hanya empat kepala keluarga yang menganggap bahwa korupsi adalah hal yang harus diberantas dengan cara menolak memberi pungli atau bersedia melaporkan secara resmi ke lembaga pengawas korupsi. Sementara ke enam lainnya merasa bahwa mengurus korupsi adalah sesuatu yang bukan areannya, keenam kepala keluarga tersebut sebenarnya sangat paham bahwa korupsi yang disamakan dengan macam – macam sebutannya seperti: uang administrasi tanpa tanda terima, Uang stempel, dll. Mereka beranggapan bahwa jumlah yang diberikan tidaklah seberapa dan bersedia membayar asalkan urusan menjadi lancar.

Namun, ada tantangan besar untuk mewujudkan orang-orang yang antikorupsi yakni adanya kesalahan persepsi mengenai korupsi. Hasil penelitian Listyo Yuwanto (2015: 2) mengenai tipe koruptor berdasarkan *basic human values tradition* (nilai dasar insani) menunjukkan adanya kekacauan persepsi dan sikap pelaku korupsi terhadap makna korupsi yang seharusnya sebagai suatu perilaku tidak bermoral. Siska Elvandari, dkk (2008: 144) juga mengemukakan bahwa permasalahan pemberantasan korupsi dari masyarakat adalah adanya persepsi yang salah tentang korupsi antara (Elvandari, 2008: 144). Dibiarkannya kondisi demikian tentu akan meningkatkan jumlah korupsi kecil (*pretty corruption*), korupsi besar (*grand corruption*) dan korupsi sitemik di Indonesia. Persepsi tentang korupsi

merupakan faktor yang membuat seseorang bahkan kelompok tidak merasa bersalah dan mencari pembenaran pada tindakan korupsi yang dilakukan. Contoh pembenaran yang sering ditemui adalah korupsi yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan.

Akan tetapi, korupsi tidak hanya berlaku di sektor pemerintahan. Di sektor swastapun korupsi dapat terjadi. Semua kepala keluarga menyadari hal ini dan tahu bahwa korupsi di sektor swastapun harus dihindari. Bahkan semua kepala keluarga sudah mengetahui metode korupsi di sektor swasta. Mereka mengetahui hal tersebut karena mempunyai pengalaman kerja yang cukup lama. Mereka sepakat bahwa apabila suatu lembaga dipimpin oleh orang yang berani merubah kebiasaan korupsi dan berani untuk berubah maka budaya korupsi akan terkikis dengan sendirinya. Seluruh keluarga sepakat untuk menunjukkan sikap anti korupsi dalam dengan tujuan memberi contoh kepada anak – anak mereka.

Saat ditanya tentang faktor apa saja yang membuat seseorang melakukan korupsi, peneliti mendapatkan jawaban yang cukup beragam. Ketujuh orang menyatakan gaya hidup dari seseorang adalah faktor yang membuat dia melakukan korupsi, lima orang menyatakan bahwa kebutuhan yang mendesak seperti keluarga yang sakit membutuhkan biaya, semuanya menyatakan bahwa lingkungan kerja sudah menganggap bahwa korupsi adalah hal biasa karena sudah dipraktekkan selama bertahun – tahun sehingga perasaan bersalah sudah hilang. Perasaan yang sudah tidak dapat merasakan lagi bahwa tindakan – tindakan korupsi adalah hal yang salah atau lebih berat lagi adalah tindakan berdosa yang keji.

Jain (2002: 77) mengungkapkan tiga faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi yakni Pertama, seseorang harus memiliki kekuasaan diskresi dalam hal penentuan kebijakan, kedua, adanya *economics rents* sebagai dampak dikeluarkannya kebijakan tersebut, ketiga, sistem yang lemah sehingga memungkinkan korupsi terjadi. Maka tidak salah bila Alatas (1975: 63-64) menyebutkan bahwa pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan cara menyediakan orang-orang yang antikorupsi untuk memegang suatu jabatan sebab kaliber moral seseorang menentukan seseorang akan korupsi atau tidak (Alatas, 1975: 63-64). Artinya, semakin banyak orang yang antikorupsi maka akan semakin baik upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Semua kepala keluarga tersebut menyatakan bahwa tidak ingin anak - anak mereka untuk mengambil dan memanfaatkan hasil dari korupsi. Mereka menyadari bahwa uang hasil korupsi seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Sembilan dari responden menyatakan bahwa korupsi seperti halnya mencuri adalah tindakan yang sangat keji karena memanfaatkan sesuatu yang buka haknya. Satu orang menyatakan menggunakan uang hasil korupsi merupakan tindakan dari pemalas yang ingin mendapatkan hasil besar tapi dengan cara yang curang.

Cara yang digunakan oleh seluruh kepala keluarga dalam menanamkan kejujuran dalam kehidupan sehari – hari bertujuan untuk menanamkan nilai – nilai

kejujuran. Lebih lanjut, para orang tua juga menyadari bahwa tindakan anti korupsi dapat menaikkan nilai diri dan tanggung jawab pada tindakan yang berpengaruh pada orang lain. Peneliti mendapatkan beberapa contoh tindakan – tindakan yang dilakukan oleh responden seperti: 1) meminta anak untuk jujur dalam menyebutkan harga buku yang harus dibeli di sekolah, 2) meminta anak untuk selalu jujur dengan kegiatan – kegiatan di sekolah yang membutuhkan biaya, 3) memberikan gambaran mengapa korupsi termasuk tindakan yang merugikan orang lain, 4) memberikan gambaran apa yang harus dilakukan saat melihat korupsi di sekitarnya, dan 5) memberikan gambaran apa yang terjadi jika korupsi terus berlangsung.

Salah satu pendekatan memerangi korupsi yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut adalah penggunaan pendekatan budaya (*cultural approach*). Pendekatan ini dapat memengaruhi sudut pandang masyarakat mengenai korupsi. Sebab, budaya memberikan kerangka pikir bagi manusia. Sehingga pendekatan budaya ini dapat diarahkan agar masyarakat dapat menganggap korupsi sebagai suatu aib agar mereka turut berperan memerangi korupsi (Wijayanto, 2009: 46-47).

Pendekatan budaya ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan baik didalam maupun diluar kelas. Pesan-pesan moral dalam pendekatan ini dapat disampaikan melalui berbagai kesenian daerah seperti wayang kulit, ludruk, film dan poster dan sebagainya (Wijayanto, 2009: 48). Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan nilai memang perlu untuk pada keseimbangan antara kecerdasan kognitif dan kecerdasan mental. Untuk itu pendidikan berbasis nilai (*value based education*) menjadi penting agar tercipta siswa yang utuh, pintar dan berkepribadian (Handoyo & Susanti, 2014: 25). Murdiono (2016: 168) mengungkapkan bahwa memang sekolah memiliki peran penting untuk melakukan penguatan gerakan antikorupsi yang salah satunya melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) disekolah. Sebagaimana hasil penelitiannya di SMP N 8 Yogyakarta, pendidikan antikorupsi terintegrasi dalam pembelajaran PKn untuk menanamkan karakter kejujuran dilakukan dengan cara memasukkan atau menyisipkannya pada tema-tema tertentu misalnya tema norma dan penegakan hukum. Dengan demikian, penanaman karakter antikorupsi dalam pembelajaran PKn dilakukan juga secara tidak langsung atau sebagai nilai-nilai yang tersembunyi atau melalui pendekatan *hidden curriculum* (Murdiono, 2016: 168). Samsuri (2011) menilai bahwa pada pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam pembelajaran PKn merupakan suatu bentuk gerakan politik nasional untuk melawan korupsi sebagai perwujudan dari gerakan reformasi nasional.

Meski demikian, pendekatan kebudayaan memiliki titik krusial yakni pelaksanaannya yang tidak boleh dilaksanakan secara formal dan kaku, tetapi melalui pendekatan yang cair dan informal (tidak ada keterpaksaan) serta dilakukan oleh tokoh-tokoh yang teruji. Selain itu, pendekatan kebudayaan dalam pemberantasan korupsi perlu dimulai sedini mungkin sehingga peran keluarga dan pendidikan dasar sangat diperlukan demi suksesi pendekatan budaya (Wiajayanto, 2009: 48). Kondisi tersebut tentu menekankan perlunya upaya bersama bukan

hanya mengandalkan pada ranah pendidikan formal diruang-ruang kelas. Itu sejalan dengan anggapan Zuriyah (2007:25) bahwa pendidikan moral atau sering disamakan dengan pendidikan karakter sangatlah luas sehingga tidak mungkin bila hanya menjadi tanggung jawab guru. Itu juga sejalan dengan yang diungkapkan Santiago (2014: 56) untuk memberantas korupsi bahwa strategi pemberantasan korupsi harus dibangun dengan adanya itikad kolektif berupa kemauan dan kesungguhan (*willingness*) dari semua pihak untuk bersama-sama melawan kejahatan korupsi. Oleh karena itu benar bila seluruh kegiatan guru, orang tua, masyarakat, dan negara harus membantu dan melakukan pelayanan ekstra dalam membantu pencapaian tujuan pendidikan moral termasuk penanaman nilai-nilai antikorupsi. Sehingga semua pihak bertanggung jawab dalam suksesti pendidikan moral tersebut (Zuriyah, 2007:25).

Pada kondisi tersebut, sesungguhnya keluarga memiliki prospek yang “furstistik” dalam suksesti pemberantasan korupsi melalui pendekatan kebudayaan karena keluarga memiliki peran vital dalam membentuk karakter anak. Hal itu sejalan dengan pendapat Lickona (2012: 327) bahwa pembangunan komunitas yang berkarakter harus membuat penguatan keluarga sebagai prioritas tinggi sebab komunitas yang kuat memerlukan keluarga yang kuat. Sukiyani & Zamroni (2014: 58-59) juga mengakui hal tersebut bahwa keluarga adalah peletak dasar pendidikan moral. Keluarga pada hakikatnya merupakan wadah pembentukan karakter masing-masing anggotanya, terutama anak-anak yang masih berada dalam bimbingan dan tanggung jawab orang tuanya. Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama bagi anak melalui kasih sayang dan pola pengasuhan yang baik. Sosialisasi sangat penting karena proses sosialisasi nilai dan norma yang dilakukan berkelanjutan mulai dari keluarga dan kemudian kepada lingkungan yang lebih luas merupakan wujud adanya proses pembudayaan dari generasi ke generasi (Meinarno, 2011: 153)

Peran orang tua dalam pembentukan karakter anak ada dalam pola asuh yang dilangsungkan. Idrus (2012: 121) menegaskan hal tersebut bahwa pola-pola pengasuhan sangat mempengaruhi pembentukan karakter anak karena akan mempengaruhi kemampuan anak untuk menyelesaikan konflik yang dialami pada tahap perkembangan psikososial tertentu. Pada pelaksanaan pola asuh atau interaksi dengan anak, orang tua dapat melaksanakan penanaman nilai-nilai antikorupsi. Nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan antikorupsi yang perlu ditanamkan pada diri anak antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Penanaman nilai-nilai antikorupsi adalah untuk mengatasi faktor internal penyebab korupsi yakni yang datangnya dari diri pribadi atau individu (Bura dan Puspito, 2011: 75).

Setiap keluarga perlu berinisiatif untuk melakukan penanaman nilai-nilai antikorupsi dalam keluarga masing-masing. Penanaman nilai-nilai antikorupsi sebagaimana pendidikan karakter dan pendidikan moral dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan sebagaimana yang disarankan Nurul Zuriyah

(2007: 75-76) yakni antara lain pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*), pendekatan perkembangan moral kognitif (*cognitive moral development approach*), pendekatan analisis nilai (*values analysis approach*), pendekatan klarifikasi nilai (*values clarification approach*) dan pendekatan pembelajaran berbuat (*action learning approach*). Berbagai pendekatan ini dapat diimplementasikan baik di sekolah maupun dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Keluarga kelas menengah di Kediri, walaupun secara tidak sadar, telah menjalankan penanaman nilai (*inculcation approach*) kepada anak – anak mereka. 7 kepala keluarga mengajari anak – anak mereka untuk jujur dalam menyebutkan harga dari keperluan sekolah, anak – anak mereka juga diminta untuk selalu berkomunikasi tentang keperluan sekolah dengan orang tua sebagai upaya agar anak – anak tidak melebihi kebutuhan sekolah mereka. Dua langkah sederhana tersebut secara efektif menanamkan sifat jujur pada anak – anak. Memang langkah tersebut relatif kecil akan tetapi jika dilakukan berkali – kali dapat menjadi sebuah kebiasaan penanaman nilai yang efektif.

Pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*) yakni mengusahakan agar anak mengenal dan menerima nilai sebagai miliknya sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya selalui tahapan: mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian dan menerapkan nilai sesuai dengan keyakinan. Selanjutnya pendekatan perkembangan moral kognitif (*cognitive moral development approach*) menekankan pada berbagai tingkatan dari pemikiran moral. Caranya dapat dilakukan dengan mengarahkan anak dalam menerapkan proses pemikiran moral melalui diskusi masalah moral sehingga mereka dapat membuat keputusan tentang pendapat moralnya. Selanjutnya pendekatan analisis nilai (*values analysis approach*) menekankan agar anak dapat menggunakan kemampuan berpikir logis dan ilmiah dalam menganalisis masalah sosial yang berhubungan dengan nilai tertentu dalam hal ini nilai-nilai antikorupsi. Kemudian anak dalam menggunakan proses berpikir rasional dan analitik dapat menghubungkan dan merumuskan konsep tentang nilai mereka sendiri (Zuriah, 2007: 75-76). Dengan membiasakan setiap tindakan baik seperti kejujuran seperti menyampaikan apa adanya, anak – anak akan menyadari bahwa yang dilakukannya adalah sebuah tindakan yang bernilai moral tinggi. Anak – anak terhindar dari berbohong, membiasakan anak untuk tidak memanfaatkan uang dari hasil ketidajujuran dan membuat anak terbiasa dengan hal baik.

Berikutnya pendekatan klarifikasi nilai (*values clarification approach*) ditujukan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan anak dalam mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri dan nilai-nilai orang lain. Pendekatan ini dapat membantu anak untuk mampu mengomunikasikan secara jujur dan terbuka tentang nilai-nilai mereka sendiri kepada orang lain dan membantu mereka dalam menggunakan kemampuan berpikir rasional dan emosional dalam penilaian perasaan, nilai, dan tingkah laku mereka. Orang tua keluarga menengah mayoritas memberikan contoh bagaimana bersikap jujur. Tujuan dari pemberian

contoh ini adalah anak – anak menjadi orang yang dapat dipercaya dan dapat mempertahankan kepercayaan tersebut. Dengan sikap ini diharapkan anak – anak dapat menjadi pribadi yang jujur dan memahami bahwa korupsi adalah ketidakjujuran yang dapat menurunkan nilai – nilai diri mereka. Jujur adalah sikap dasar untuk terhindar dari perbuatan korupsi.

Terakhir, pendekatan pembelajaran berbuat (*action learning approach*) ditujukan untuk mengembangkan kemampuan anak - anak dalam melakukan kegiatan sosial serta mendorong mereka untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk yang senantiasa berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai pendekatan tersebut tentunya dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebiasaan dan budaya yang ada dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat (Zuriah, 2007: 75-76). Sikap yang terakhir ini adalah sifat dasar yang harus ditanamkan orang tua pada anak – anak mereka keinginan untuk selalu belajar menjadi makhluk sosial yang tindakannya mungkin akan berpengaruh pada kehidupan orang lain. Korupsi seringkali dilakukan oleh individu yang tidak melihat kehidupan orang lain. Korupsi hanya dilakukan oleh orang yang hanya mementingkan diri sendiri dan perasaan bersalah telah hilang dari diri mereka. Orang tua menanamkan nilai ini dengan cara memberikan contoh kerugian dirasakan oleh banyak orang jika jalanan yang seharusnya baik rusak karena dananya dikorupsi atau penurunan kualitas pendidikan karena sistem rekrutmen guru mengabaikan kualitas peserta karena menerima peserta yang mau membayar. Kedua contoh tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan betapa merugikannya korupsi bagi masyarakat.

E. KESIMPULAN

Sudah saatnya kejahatan korupsi diperangi oleh seluruh lapisan masyarakat bangsa dan negara melalui gerakan antikorupsi bersama. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mewujudkan penanaman nilai-nilai antikorupsi dan prinsip-prinsip antikorupsi disemua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di lingkungan pendidikan, keluarga dan masyarakat. Penciptaan warga negara merupakan dasar bagi kuatnya gerakan pemberantasan korupsi. Penanaman nilai-nilai antikorupsi di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat merupakan salah satu cara mewujudkan generasi tanpa korupsi dimasa depan sehingga tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia bisa semakin sejahtera, aman, dan damai tanpa terganggu oleh korupsi. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan pendekatan kebudayaan. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat memegang peranan penting untuk melaksanakan pemberantasan korupsi melalui pendekatan kebudayaan dengan cara menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada anak dalam pelaksanaan pola asuh keluarga. Penanaman nilai-nilai antikorupsi dalam keluarga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*), pendekatan perkembangan moral kognitif (*cognitive moral*

development approach), pendekatan analisis nilai (*values analysis approach*), pendekatan klarifikasi nilai (*values clarification approach*) dan pendekatan pembelajaran berbuat (*action learning approach*).

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, Syed Hussein. (1990). *Corruption: its nature, causes and consequences aldershot*. Brookfield Vt: Avebury

----- (1981). *Sosiologi korupsi: sebuah penjelasan dengan data kontemporer*. (Terjemahan Al Ghozie Usman). Jakarta: LP3ES (Buku asli diterbitkan tahun 1975)

Azyumardi Azra. (2007). *Religiuos-based civil society and anti-corruption campaign The Indonesian experiance in the creation of good governance*. Dalam Helen James. *Civil society, Religion and Global Governance: Paradigms of power and persuasion*. New York: Routledge

----- (2010). Islam, corruption, good governance, and civil society: the indonesian experience. *Islam and Civilisational Renewal Journal* Vol 2, No 1 Tahun 2010 hlm. 14-31

Budi Setiyono. (2010). Korupsi, transisi demokrasi & peran organisasi civil society (CSO): Sebuah Tinjauan Teoritis. *Jurnal Politika*, Vol. I No. 1, April 2010 hlm. 5-16

Budi Winarno. (2011). *Isu-isu global kontemporer*. Yogyakarta: PT Buku Seru

Deny Setyawati. (2008). *KPK pemburu koruptor*. Yogyakarta: Pustaka Timur

Eko A. Meinarno. (2010). Konsep dasar dalam keluarga. Dalam Karlinawati Silalahi & Eko A. Meinarno. (2010). *Keluarga Indonesia: aspek dan dinamika zaman*. Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 3-12

Eko Handoyo & Martien Herna Susanti. (2014). Dampak korupsi melalui pendidikan antikorupsi dalam membentuk generasi muda yang jujur dan berintegritas di sma semesta Kota Semarang. *Jurnal ABDIMAS* Vol. 18 No. 1, Juni 2014 hlm. 19-26

- Easterly, Williams (2001). *The Elusive Quest for Growth: Economists' Adventures and Misadventures in the Tropics*. The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England
- Faisal Santiago. (2014). Strategi pemberantasan kejahatan korupsi: kajian legal sosiologis). *Jurnal Lex Publica*, Vol. 1 No. 1, Januari 2014, hlm. 54-68
- Febri Diansyah. (2009). Senjakala pemberantasan korupsi; memangkas akar korupsi dari pengadilan tipikor. *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009 hlm. 2-7
- Fita Sukiyani & Zamroni. (2014). Pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga. *Jurnal Ilmu Sosial*, Mei 2014 , Vol. 11, No. 1, hlm. 57-70
- Halili. (2010). *Potong generasi Korupsi*. Diunduh dalam <http://regional.kompas.com/read/2010/04/19/04500140/Potong.Generasi.Korupsi> pada Rabu, 2 Maret 2016 Jam 16.00 WIB
- H. M. Arsyad Sanusi. (2009). Relasi antara korupsi dan kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*. Volume 6. Nomor 2. Juli 2009, 83-104
- Jain, Arvin K. (2001). Corruption: a review. *Journal of Economic Surveys*, Vol. 15 No. 1 hlm. 71-121
- Kerr, David. (1999), Citizenship education in the curriculum: an international review, *The School Field*, Vol. X, No. 3-4
- Klitgaard, Robert. (2005). *Membasmi korupsi*. (Terjemahan Hermojo). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (Buku asli diterbitkan tahun 1988)
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2012). *Baseline study tahap I pencegahan korupsi berbasis keluarga*. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan
- (2014). *Membangun GenAksi dari keluarga jujur keluarga bahagia*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI.

- . (2014). *KPK kembangkan pencegahan*. Diakses di <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2391-kpk-kembangkan-pencegahan>, pada Sabtu, 06 November 2016 pukul 02.00 WIB.
- Lickona, Thomas. (2012). *Character materr: persoalan karakter bagaimana membantu anak mengembangkan penilaian yang baik, integritas dan kebijakan pengting lainnya*. (Terjemahan Juma Abdu Wamaungo & Jean Antunes Rudolf Zien). Jakarta: PT Bumi AKsara
- Listyo Yuwanto. (2015). Profil koruptor berdasarkan tinjauan basic human values. *Jurnal Anti Korupsi Integritas*. Vol. 1, No. 1, November 2015, 1-14
- Mahmud Mulyadi. (2011). Penanggulangan tindak pidana korupsi dalam perspektif *criminal policy (corruption reduction in criminal policy perspective)*. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 8 No. 2 - Juni 2011, hlm. 217-238
- Mansyur Semma. (2008). *Negara dan korupsi: pemikiran mochtar lubis atas negara, manusia indonesia, dan perilaku politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Muhammad Idrus. (2012). Pendidikan karakter pada keluarga jawa. *Jurnal Pendidikan Karakter*. Tahun II, Nomor 2, Juni 2012, 118-130
- Muhammad Nasrum. (2013). *Tentang kata korupsi yang datang silih berganti: I suatu penjelasan budaya*. Jakart. *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol. 34 No. 1 2013 hlm. 1-14
- Mukhamad Murdiono. (2016). Pendidikan Anti Korupsi Terintegrasi dalam Pembelajaran PKn untuk Menanamkan Karakter Kejujuran di SMP. *Jurnal Socia* Volume 15. No.1 Juni 2016, 166-184
- Romie O. Bura & Nanang T. Puspito (2011). Nilai dan Prinsip Anti Korupsi. Dalam Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian
- Samsuri. (2011). *Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Kompetensi Warga Negara*. Yogyakarta: Makalah Kuliah Umum Di Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn) Fkip Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 9 Mei 2011.

- Selo Soemardjan. (1998). Pengantar Edisi Indonesia. Dalam Robert Klitgaard. (2005). *Membasmi korupsi*. (Terjemahan Hermojo). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (Buku asli diterbitkan tahun 1988)
- Siska Elvandari, dkk. (2008). Menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi dalam keluarga (sosialisasi program anti korupsi). *Warta Pengabdian Andalas* Vol. XIV, No. 21, Desember 2008 hlm. 143-152
- Sri Lestari. (2012). Psikologi keluarga: penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga. Jakarta: Kencana
- Tanzi, Vito. (1998). Corruption around the world causes, consequences, scope, and cures. *Jurnal IMF Staff Papers*, Vol. 45, No. 4 (December 1998), hlm. 559-594
- Treisman, Daniel. (2000). The causes of corruption: a cross-national study. *Journal of Public Economics* 76 (2000) hlm. 399–457
- Wahyudi Thohari, dkk. (2015). *Survei persepsi korupsi 2015*. Jakarta: Transparency International Indonesia
- Wijayanto. (2009). Memahami korupsi. Dalam Wijayanto & Ridwan Zachrie eds. (2009). *Korupsi mengorupsi Indonesia: sebab, akibat dan prospek pemberantasan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 3-5